

4665

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAY.JEN. SUTOYO, CILILITAN JAKARTA TIMUR**

NO.	NAMA KORAN	TANGGAL/BULAN/2007											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	KOMPAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	REPUBLIKA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3.	SUARA KARYA	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
4.	SUARA PEMBARUAN	JANUARI			PEBRUARI			MARET			APRIL		
5.	MEDIA INDONESIA	MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS		
6.	BISNIS INDONESIA	SEPTEMBER			OKTOBER			NOPEMBER			DESEMBER		
7.	KORAN TEMPO	BERSAMBUNG :				HLM. :			KOLOM : 1-6				
SUBYEK:		KORUPSI - SOEHARTO										4	

JAJAK PENDAPAT "KOMPAS"

Merentang Kembali Kekuasaan Soeharto

Reaksi bernada positif terhadap pengumuman Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia yang menempatkan Soeharto sebagai pencuri terbesar aset negara menunjukkan kegeraman masyarakat atas buntutnya proses pengusutan korupsi mantan Presiden RI tersebut. Seharusnya, momentum ini dimanfaatkan pemerintah untuk lebih serius dalam menyelesaikan perkara korupsi mantan penguasa tersebut.

Oleh SULTANI

Peringatan tersebut tidak berlebihan, mengingat semenjak Soeharto lengser dari singgasananya, empat presiden penerusnya tidak satu pun yang berhasil memejahijaukan mantan Presiden Republik Indonesia ke-2 ini. Padahal, jejak kesalahan Soeharto sudah ditelisik oleh Kejaksaan Agung tiga bulan setelah ia mundur.

Bukti-bukti yang didapat kejaksaan waktu itu mengindikasikan, selama kurun waktu 32 tahun, Soeharto mengeruk kekayaan untuk diri sendiri, keluarga, dan kroni-kroninya melalui tujuh yayasan yang dipimpinnya. Celakanya, uang yang masuk ke dalam kas tujuh yayasan tersebut diperoleh dari perusahaan-perusahaan swasta dan negara dengan menggunakan keputusan presiden. Kerugian negara dari tindakan Soeharto ini diperkirakan 571 juta dollar AS (George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana,*

C : BLANGKO,DOC/PUSDOK-

Tangsi, dan Partai Penguasa, LkiS: Yogyakarta, 2006).

Temuan serupa diungkapkan majalah *Time* dalam edisi khusus dengan judul *Soeharto Inc: How Indonesia's Boss Built a Family Fortune*. Edisi 24 Mei 1999 itu secara gamblang mengungkapkan kekayaan Soeharto berikut keluarga dan kroni-kroninya yang bertebaran di beberapa belahan dunia.

Menurut data *Time*, tahun 1999 kekayaan Soeharto mencapai 9 miliar dollar AS. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto juga membangun kerajaan bisnis bersama keluarga dan kolega-koleganya melalui praktik monopoli terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dari praktik bisnis tersebut, Soeharto bisa memupuk harta yang diperkirakan mencapai 73,24 miliar dollar AS (Rp 659 triliun). Jumlah yang sangat fantastis.

Soeharto sendiri pernah membantah bahwa dirinya memiliki kekayaan di luar negeri. "Saya tidak punya satu sen pun uang di luar negeri," katanya pa-

da 6 September 1998, delapan bulan sebelum *Time* melansir beritanya. Tidak puas dengan pemberitaan *Time*, Soeharto mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap majalah itu. Padahal, dalam waktu yang bersamaan Soeharto juga sedang menghadapi dakwaan Kejaksaan Agung atas korupsi yang diduga dilakukan melalui tujuh yayasannya.

Di satu sisi, Soeharto selalu menolak persidangan perkara korupsinya. Namun, dia proaktif menggugat majalah *Time* yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Meskipun pengadilan negeri maupun pengadilan tingkat banding menolak semua gugatan Soeharto atas *Time*, Soeharto tak lantas menyerah. Ia pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Tanggal 28 Agustus lalu MA mengeluarkan keputusan memenangkan gugatan Soeharto atas *Time*. *Time* harus membayar uang Rp 1 triliun kepada Soeharto dan meminta maaf melalui media massa.

Dalam jajak pendapat kali ini yang secara khusus menyoroti pengusutan kekayaan Soeharto, publik menyangsikan keseriusan pemerintah menyelesaikan perkara ini. Sebagian besar responden mengatakan, Kejaksaan Agung, MA, maupun Polri tidak serius menyelesaikan perkara korupsi yang melibatkan bekas orang kuat Indonesia itu.

Di dalam benak mayoritas responden, Soeharto diyakini memiliki kekayaan yang disimpan di luar negeri, sebagaimana

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAY.JEN. SUTOYO, CILILITAN JAKARTA TIMUR**

SAMBUNGAN	HALAMAN: V KOLOM: 1-6	TANGGAL/BULAN/2007										
		(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		JANUARI			PEBRUARI			MARET			APRIL	
		MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS	
		SEPTEMBER			OKTOBER	NOPEMBER						
		DESEMBER										

yang diberitakan *Time*.

Karena itulah, keputusan hukum yang memenangkan Soeharto dianggap telah menyalahi prinsip keadilan. Setidaknya, 63,9 persen responden merasa keputusan MA dalam perkara Soeharto vs *Time* baru-baru ini tak adil. Dua dari tiga responden malah merasa hukuman yang diberikan MA kepada *Time* sebagai tindakan yang berlebihan.

Kemenangan Soeharto yang diberikan MA semakin menelanjangi kebobrokan aparat penegak hukum dan sistemnya dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum tampaknya tidak akan membaik. Setidaknya, 60 persen responden tak yakin penegak hukum Indonesia mampu mengusut dan mengembalikan kekayaan Soeharto di luar negeri.

Komitmen pemerintah untuk menuntaskan perkara Soeharto pun diragukan masyarakat. Sebanyak 61,9 persen responden merasa pemerintah, terutama Presiden Yudhoyono, tidak akan mampu mengusut dan mengembalikan harta Soeharto.

Padahal, melalui Prakarsa Pengembalian Aset Curian atau Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative yang dilansir PBB dan Bank Dunia pada 17 September lalu, kedua lembaga tersebut siap membantu negara berkem-

bang memulangkan aset yang dicuri pemimpinnya yang korup dan mencegah secara internasional pelarian uang hasil kejahatan. "Tidak boleh ada surga yang aman bagi mereka yang mencuri dari masyarakat miskin," kata Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick.

Data yang dilansir dari temuan Transparency International (2004) itu menempatkan nama Soeharto di tempat teratas dari 10 nama kepala negara yang dianggap sebagai pencuri aset negara. Jumlah kekayaan yang dicuri 15-35 miliar dollar AS.

Publik Indonesia sudah lama menanti adanya terobosan lain dalam penyelesaian perkara korupsi Soeharto. Tidak mengherankan kalau 62,4 persen responden menyambut positif dan setuju terhadap pengumuman PBB tersebut. Mereka juga berpikir cukup rasional dengan mengempatkan pengusutan korupsi sebagai hal yang lebih utama daripada menonjolkan jasa-jasa Soeharto pada masa lalu.

Meskipun demikian, keterlibatan asing dalam pengusutan kasus ini cukup menimbulkan kontroversi. Sekitar 45,5 persen responden setuju dengan pelibatan pihak asing dalam kasus ini, sementara 48,8 persen responden lainnya justru menolak keterlibatan asing.

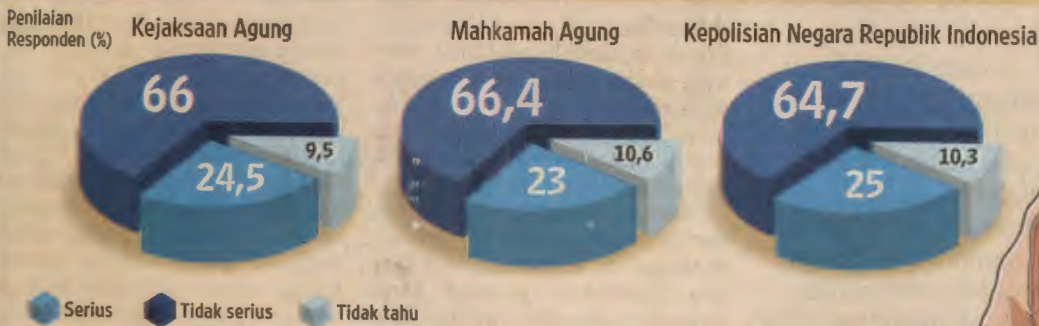
(LITBANG KOMPAS)

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAY.JEN. SUTOYO, CILILITAN JAKARTA TIMUR**

SAMBUNGAN	HALAMAN: KOLOM: 1-6	TANGGAL/BULAN/2007										
		①	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		JANUARI			PEBRUARI			MARET			APRIL	
		MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS	
		SEPTEMBER			OKTOBER ✓			NOPEMBER				
DESEMBER												

Jajak Pendapat "Kompas" mengenai Soeharto

"Menurut Anda, serius atau tidak seriuskah lembaga-lembaga penegak hukum berikut ini dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto?"



"Setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan yang diumumkan oleh PBB dan Bank Dunia bahwa Soeharto adalah mantan penguasa yang mencuri aset negara paling banyak?"

"Menurut Anda, saat ini lebih penting mana: menghargai jasa-jasa Soeharto atau mengusut tuntas korupsi yang telah dilakukannya?"



Metode Jajak Pendapat

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas 26-27 September 2007. Sebanyak 845 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 3,4 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini.

n = 845
Sampling error = +/- 3,4%
Sumber: Litbang Kompas